



## Peran Manajemen Keuangan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Irene Olhan Rumbrar<sup>1</sup>, Baharuddin<sup>2</sup>, Yoel Pasae<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 07-02-2025 | Review: 17-02-2025 | Revision: 22-02-2025 | Accepted 25-02-2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen keuangan dalam optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam pegawai BPPKAD yang terlibat langsung dalam pengelolaan BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan yang efektif berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan BMD. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kendala regulasi yang sering berubah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan kebijakan dan pengawasan dalam pengelolaan aset daerah. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan pengelolaan BMD dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Manajemen Keuangan, Optimalisasi, Barang Milik Daerah, Pengelolaan Aset, BPPKAD.

**Abstract:** This study aims to analyze the role of financial management in optimizing the management of Regional Property (BMD) at the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency (BPPKAD) of Central Papua Province. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of six BPPKAD employees who were directly involved in the management of BMD. The results of the study indicate that the implementation of effective financial management contributes to transparency, accountability, and efficiency in BMD management. However, there are still several obstacles, such as the limitations of competent human resources, the lack of utilization of information technology, and frequently changing regulatory constraints. To overcome these challenges, it is necessary to increase the capacity of human resources through training, optimizing information systems, and strengthening policies and supervision in regional asset management. With the implementation of this strategy, it is hoped that BMD management can be more optimal and contribute to sustainable regional development.

**Keywords:** Financial Management, Optimization, Regional Property, Asset Management, BPPKAD.

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Salah satu elemen penting dalam manajemen

<sup>1</sup>E-mail: [irenerumbrar28@gmail.com](mailto:irenerumbrar28@gmail.com)

<sup>2</sup>E-mail: [Baharuddin@ukipaulus.ac.id](mailto:Baharuddin@ukipaulus.ac.id)

<sup>3</sup>E-mail: [yoelpasae@ukipaulus.ac.id](mailto:yoelpasae@ukipaulus.ac.id)

keuangan daerah adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup tanah, bangunan, kendaraan, serta aset lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik (Dori et al., 2025; Randan et al., 2025). Pengelolaan BMD yang tidak optimal dapat menghambat pembangunan daerah serta menimbulkan potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara (Horne & Wachowicz, 2021).

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah berperan penting dalam memastikan pemanfaatan BMD secara efisien. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pengelolaan BMD. Tantangan tersebut meliputi kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen aset, keterbatasan teknologi informasi dalam pencatatan dan pemantauan aset, serta perubahan regulasi yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan (Lestari, 2020).

Data yang diperoleh dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi kendala serupa dalam pengelolaan aset daerah. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2022), lebih dari 40% pemerintah daerah di Indonesia belum menerapkan sistem pencatatan aset yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang berakibat pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen keuangan yang lebih terstruktur dan inovatif guna mengoptimalkan pengelolaan BMD agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Mangallo et al., 2025; Paranoan et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran manajemen keuangan dalam optimalisasi pengelolaan BMD di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola aset publik. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang manajemen keuangan daerah serta memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan pengelolaan aset yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi dalam mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif dalam pengelolaan aset daerah.

## **Tinjauan Literatur**

### **Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan Aset Daerah**

Manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Dori et al., 2025; Paembonan et al., 2024). Menurut Gitman (2021), manajemen keuangan adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pemanfaatan aset daerah (Horne & Wachowicz, 2021).

### **Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Optimalisasi pengelolaan BMD merupakan upaya untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal (Mangopo

et al., 2025). Terry (2021) menyatakan bahwa optimalisasi adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan biaya yang minimal (Halik et al., 2024). Di lingkungan pemerintahan daerah, optimalisasi BMD dapat dilakukan melalui sistem pencatatan yang baik, pemeliharaan aset, serta perencanaan keuangan yang strategis (Lestari, 2020).

### **Konsep Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan aset daerah. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 menekankan bahwa pemerintah daerah harus menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan BMD. Studi oleh Musthafa (2017) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan mengurangi potensi penyalahgunaan aset (Sabandar et al., 2022).

### **Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah**

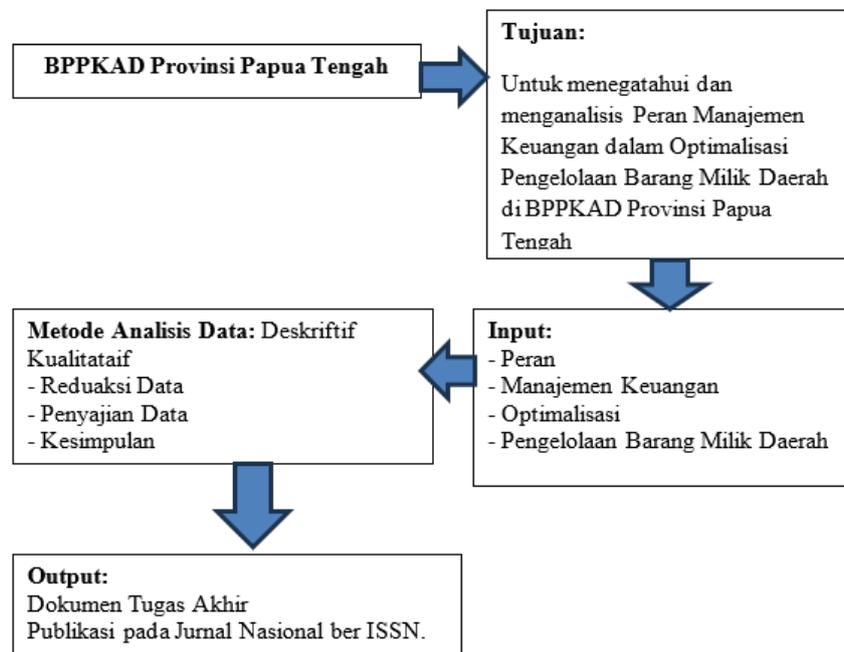
Pengelolaan aset daerah yang efektif tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Lepa et al. (2019), penggunaan sistem informasi yang berbasis digital dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset secara lebih efisien. Studi lain yang dilakukan oleh Rahayu (2019) menegaskan bahwa sistem informasi berbasis digital mampu meningkatkan akurasi data serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan (Halik et al., 2023; Lambe & Halik, 2024).

### **Kesenjangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pengelolaan BMD masih menghadapi berbagai kendala. Lestari (2020) mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya anggaran untuk pemeliharaan aset, serta perubahan regulasi yang sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas manajemen aset daerah, baik melalui pelatihan SDM maupun penerapan kebijakan yang lebih adaptif (Gitman, 2021).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen keuangan dapat berperan dalam optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah serta efisiensi dalam pemanfaatan aset publik.

## Model Konseptual



Sumber: Pemikiran Penulis (2025)

**Gambar 1.** Model Konseptual

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam peran manajemen keuangan dalam optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Penelitian dilakukan di kantor BPPKAD Provinsi Papua Tengah selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2024.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPPKAD. Sampel dipilih secara purposive (Sugiyono, 2020), dengan mempertimbangkan posisi dan keterlibatan pegawai dalam manajemen BMD. Informan utama dalam penelitian ini adalah enam pegawai yang memiliki tugas langsung dalam pengelolaan aset daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait kebijakan serta laporan keuangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali perspektif informan mengenai tantangan dan strategi dalam pengelolaan BMD.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan validitas temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami latar belakang demografis yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Responden terdiri dari pegawai BPPKAD Provinsi Papua Tengah yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Data menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun, dengan tingkat pendidikan minimal sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan sistem pengelolaan BMD di lingkungan pemerintahan daerah.

### Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan BMD adalah kurangnya pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pemeliharaan aset daerah. Salah satu responden menyatakan bahwa:

*“Kami sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan aset karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi baru yang sering berubah.”*

Selain itu, wawancara juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi masih terbatas, sehingga proses pencatatan dan monitoring aset masih dilakukan secara manual. Hal ini menghambat efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan BMD

### Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penerapan manajemen keuangan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BMD. Berdasarkan data yang diperoleh, faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan BMD meliputi:

1. Kompetensi SDM – Kurangnya pelatihan dan pembaruan pengetahuan pegawai menghambat efektivitas pencatatan dan pemanfaatan aset.
2. Penggunaan Teknologi – Implementasi sistem digitalisasi dalam pencatatan dan pengelolaan aset masih terbatas, menyebabkan inefisiensi dalam pemantauan aset.
3. Kebijakan dan Regulasi – Perubahan regulasi yang sering terjadi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan pengelolaan BMD.

Temuan penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, yaitu bagaimana manajemen keuangan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan BMD di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, penerapan strategi yang lebih sistematis dalam peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD secara signifikan.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan pelatihan bagi pegawai, penerapan sistem informasi berbasis digital, serta penyusunan kebijakan yang lebih adaptif untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan BMD di pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran manajemen keuangan dalam optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BMD. Penerapan sistem informasi berbasis digital juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan monitoring aset daerah.

Secara keseluruhan, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa manajemen keuangan yang baik berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD diterima. Faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, regulasi yang dinamis, dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam implementasi manajemen keuangan yang efektif di pemerintahan daerah.

Meskipun memberikan wawasan yang berharga, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan sampel dan pendekatan analisis yang digunakan. Studi ini hanya berfokus pada satu wilayah tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik berbeda.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan geografis diperluas dengan membandingkan beberapa daerah guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan penelitian yang lebih mendalam, seperti analisis longitudinal atau metode campuran, dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang dikaji.

Dengan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan BMD guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan efisien di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jakarta: BPK RI.
- Dori, H. P., Lambe, K. H. P., & Sabandar, S. Y. (2025). ANALISIS DAMPAK SISTEM PELAYANAN KAS DAERAH ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH DI BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA NABIRE. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 27-34. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/853>
- Gitman, L. J. (2021). *Principles of Managerial Finance*. Pearson.
- Halik, J. B., Parawansa, D. A. S., Sudirman, I., & Jusni, J. (2023). Implications of IT Awareness and Digital Marketing to Product Distribution on the Performance of Makassar SMEs. *유통과학연구 Journal of Distribution Science*, 21(7), 105-116. <https://doi.org/10.15722/jds.21.07.202307.105>
- Halik, J. B., Rantererung, C. L., Sutomo, D. A., Rasinan, D., Daud, M., & Todingbua, M. A. (2024). *Era Disruptif* (J. B. Halik (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtDE\\_GYwrlvO4k&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtDE_GYwrlvO4k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Horne, J. C. V., & Wachowicz, J. M. (2021). *Fundamentals of Financial Management*. Pearson.
- Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2024). INOVASI PRODUK DAN PROSES SEBAGAI KUNCI KEUNGGULAN BERSAING UKM KULINER. *Paulus Journal of*

- Accounting (PJA)*, 6(1), 82-93.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/805>
- Lepa, R., Setiawan, B., & Putra, A. (2019). Digitalisasi sistem pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan transparansi keuangan. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 5(2), 45-59.
- Lestari, N. (2020). Evaluasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Publik*, 8(1), 12-28.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108-115.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Musthafa, I. (2017). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah: Studi kasus di pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(2), 134-150.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1-6.  
<https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, 19, 54-62.  
<https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6>
- Rahayu, S. (2019). Implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam pengelolaan aset pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 7(3), 77-92.
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 101-107.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712>
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*.  
<https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Sugiyono. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Terry, G. (2021). *Strategic Decision Making in Public Sector Management*. Oxford University Press.